



IKD

Identitas Fisik Masih Dipakai

JOGIA - Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Jogja masih jauh dari target nasional. Angkanya baru lima persen. Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan aktivasi IKD di angka 30 persen dari total pemilik e-KTP daerah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja Septi Sri Rejeki mengatakan, ada berbagai kendala yang dihadapi. Di antaranya masih banyak masyarakat yang belum yakin terhadap IKD. Hal itu disebabkan karena belum semua instansi layanan publik bisa mengintegrasikan IKD sebagai syarat administrasi. Sehingga identitas fisik yang masih digunakan.

Kemudian, kondisi di Kota Jogja disebutnya juga banyak masyarakat yang belum memiliki sarana dan prasarana untuk IKD. Yakni berupa handphone yang mumpuni untuk diinstal aplikasi tersebut.

"Kendalanya pertama belum semua instansi pelayanan publik menerapkan IKD. Kedua, ada masyarakat yang tidak punya gadget, lalu ada yang punya tapi tidak support," ujar Septi, Rabu (11/9).

Septi mengaku, pihaknya terus menggenjot agar seluruh instansi pelayanan publik di Kota Jogja bisa menerapkan IKD. Upayanya dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi yang menasar pengelola pelayanan publik.

Dia mengklaim, di Pemkot Jogja semua organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik sudah terintegrasi dengan IKD. Kemudian di luar itu, seperti layanan kesehatan, transportasi, dan kepolisian juga sudah terintegrasi. "Hanya perbankan yang belum semua mengimplementasikan IKD," beber Septi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, IKD memungkinkan masyarakat untuk memilih dokumen kependudukan secara digital. Hal itu tentunya akan membuat masyarakat lebih efisien untuk mengelola data pribadinya.

Sugeng berharap agar masyarakat aktif untuk melakukan aktivasi IKD pada gadgetnya masing-masing. Terlebih kebijakan tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang IKD. "Sekarang semua pelayanan sudah terintegrasi digital," sebut Sugeng. (inu/prs/fj)

Kendalanya pertama belum semua instansi pelayanan publik menerapkan IKD. Kedua, ada masyarakat yang tidak punya gadget, lalu ada yang punya tapi tidak support,"



SEPTI SRI REJEKI
Kepala Disdukcapil Kota Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005